

Dinamika Perilaku Politik Perempuan Marjinal dalam Pemilihan Kepala Daerah : Studi di Kota Kendari

Syaifudin Suhri Kasim ^{1*}, Sarmadan ², Suryani BB ³, Asriani ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia; syaifudinsuhrikasim@gmail.com

* Correspondence : syaifudinsuhrikasim@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik perempuan marjinal sehingga berdampak pada perilaku politik mereka di Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam faktor sumber daya politik, sosial, ekonomi, dan budaya patriarki mempengaruhi perilaku politik mereka. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi politik perempuan marjinal dalam Pilkada langsung sangat dipengaruhi oleh akses terhadap sumber daya politik, faktor sosial, ekonomi, dan budaya patriarki. Mayoritas perempuan marjinal memilih calon yang dianggap mampu mendukung kebutuhan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan komunitas. Sikap politik mereka juga terbentuk oleh pengalaman hidup, interaksi sosial, dan peran mereka dalam keluarga. Kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan marjinal, seperti peningkatan kesempatan kerja atau program pelatihan keterampilan, sering kali menarik perhatian mereka. Preferensi ini bukan hanya merupakan hasil dari kebutuhan mendesak, tetapi juga cerminan aspirasi perempuan marjinal untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dan lingkungannya.

Kata kunci : *Perilaku Politik, Perempuan Marjinal, Pilkada Langsung*

ABSTRACT

The problem of this research is how and what factors influence the political behavior of marginalized women so that it has an impact on their political behavior in Kendari City. This study aims to explore more deeply the factors of political, social, economic, and patriarchal cultural resources that influence their political behavior. This research is a qualitative descriptive study, with a case study approach. This study uses a qualitative research method. The methods used to collect data in this study are observation, interviews and documentation. The results of the study show that the political preferences of marginalized women in the Pilkada are directly influenced by access to political resources, social, economic, and patriarchal cultural factors. The majority of marginalized women choose candidates who are considered capable of supporting family needs and improving community welfare. Their political attitudes are also shaped by their life experiences, social interactions, and roles in the family. Policies that focus on the economic empowerment of marginalized women, such as increasing employment opportunities or skills training programs, often attract their attention. This preference is not only the result of urgent needs, but also a reflection of the aspirations of marginalized women to improve the standard of living of their families and their environment.

Keywords : *Political Behavior, Marginalized Women, Direct Election.*

Pendahuluan

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan sejak diterapkannya pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada langsung) di berbagai tingkatan pemerintahan. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh masyarakat setempat maka pemilukada secara langsung sangat erat kaitannya dengan demokrasi di mana kedaulatan terletak ditangan rakyat (Manar, 2018; Sarbaini, 2020). Salah satu aspek yang menarik perhatian dalam Pilkada langsung adalah bagaimana masyarakat dari berbagai lapisan sosial terlibat dalam proses politik ini. Di antara kelompok masyarakat yang memiliki peran penting namun sering kali terabaikan adalah perempuan marjinal. Meskipun perempuan marjinal merupakan bagian besar dari populasi desa, kontribusi mereka dalam politik, khususnya dalam Pilkada langsung, masih kurang diakui. Melalui kajian terhadap perilaku politik perempuan marjinal, kita dapat memahami lebih dalam bagaimana kelompok ini berpartisipasi dalam proses demokrasi dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan mereka (Ladini & Yuwanto, 2019).

Secara historis, partisipasi politik perempuan marjinal di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, didorong oleh kebijakan afirmasi kuota 30% perempuan marjinal dalam lembaga legislative yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 (Pambudi, 2012). Perempuan marjinal yang awalnya berperan sebagai pelengkap sekarang mengambil peran baik secara kuantitas maupun kualitas dalam proses politik ditingkat kebijakan dan keputusan strategis terkait pengembangan sosial ekonomi masyarakat (Asmorojati & Nur, 2019). Hal ini tidak terlepas dari adanya gerakan *affirmative action* yang menginginkan adanya peluang yang sama bagi perempuan marjinal untuk ikut serta dalam konstelasi politik (Bela & Utama, 2020). Namun, dalam konteks perkotaan maupun pedesaan, khususnya perempuan marjinal, partisipasi politik mereka di Pilkada masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses sumber daya politik, informasi, pendidikan politik yang rendah, hingga tradisi patriarki yang masih kuat (Tarigan, 2020; Husmidar et al., 2020; Putri & Putri, 2022). Budaya patriarki selalu mengutamakan atau memposisikan kaum laki-laki paling atas jika dibandingkan dengan kaum perempuan marjinal. Dari hal inilah perempuan marjinal merasa kurang diperhatikan sehingga perempuan marjinal kurang percaya diri untuk berkiprah atau maju dalam panggung politik (Kollo, 2017). Selain itu, pilkada langsung memberikan ruang bagi perempuan marjinal untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon kepala daerah (Anugrah, 2022; Siregar et al., 2024). Faktor ekonomi, termasuk ketergantungan pada sektor pertanian, serta akses terhadap sumber daya politik, juga mempengaruhi perilaku politik perempuan marjinal (Arfi et al., 2023; Aula Rizki, 2023). Mereka sering kali dipengaruhi oleh elite lokal atau tokoh masyarakat, yang mengarahkan preferensi politik mereka (Sarinastiti & Fatimah, 2019; Mahmud & Yunus, 2019). Kemudian hadirnya relasi kuasa otoritarian yang dilanggengkan oleh kultur dan rendahnya tingkat pendidikan dan pengalaman perempuan marjinal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku politik perempuan marjinal (Tokan & Gai, 2020).

Kajian tentang perilaku politik perempuan marjinal dalam Pilkada langsung menjadi penting untuk memahami bagaimana mereka merespons dinamika politik lokal dan sejauh mana keterlibatan mereka berkontribusi terhadap hasil pemilihan. Di sisi lain, pemahaman perilaku politik perempuan marjinal (Kushandajani et al., 2023) juga dapat mengungkapkan

strategi-strategi politik yang digunakan oleh partai dan kandidat dalam menarik dukungan dari komunitas pedesaan, khususnya perempuan marjinal (Suhenty, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam motivasi, sikap, serta preferensi politik perempuan marjinal dalam Pilkada langsung, serta bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan budaya mempengaruhi perilaku politik mereka. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian perilaku politik perempuan marjinal di tingkat lokal dan peran mereka dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Alasan penggunaan studi deskriptif adalah pertama, penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran ciri sosial atau psikologis kelompok atau komunitas tertentu. Kedua, penelitian deskriptif menjelaskan keberadaan kelompok dan komunitas yang menunjukkan perbedaan dalam konteks perilaku (Arikunto, 2018).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan latar belakang alamiah dengan maksud untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan metode penelitian lainnya. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah suatu rancangan penelitian yang dapat dilakukan dalam berbagai bidang dimana peneliti menganalisis suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (Creswell, 2016).

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang diperlukan maka peneliti turun secara langsung kelapangan kemudian melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD). Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Notoatmodjo (2010), proses pengolahan data dilakukan dengan cara: pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), rekonstruksi datad an sistematis data (*systematizing*).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode model Miles dan Huberman (1994) menyatakan bahwa proses pengumpulan data dilakukan 3 kegiatan penting diantaranya reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), verifikasi (*verification*) (Rodsyada (2020). Dalam penelitian ini, kesimpulan dan verifikasi disajikan dalam bentuk teks naratif yang menjelaskan tentang perilaku politik perempuan marjinal dalam Pilkada Langsung di Kota Kendari.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik Perempuan Marjinal

1. Akses Terhadap Sumber Daya Politik

Akses perempuan marjinal terhadap sumber daya politik memainkan peran penting dalam membentuk perilaku politik mereka. Di Indonesia, khususnya di Kota Kendari sering kali mengalami tantangan dalam mengakses sumber daya politik yang berharga. Sumber daya ini mencakup pendidikan politik, informasi mengenai hak pilih, serta kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan politik atau menduduki posisi yang dapat memengaruhi kebijakan.

Perempuan marjinal, yang terbiasa dengan peran domestik dan tanggung jawab rumah tangga, sering kali dihadapkan pada kendala struktural yang membatasi akses mereka terhadap politik. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah, terbatasnya akses terhadap informasi, dan keterbatasan ekonomi seringkali menghalangi mereka untuk terlibat dalam proses politik. Hal ini diperburuk oleh budaya patriarki yang masih kuat di banyak wilayah pedesaan, yang cenderung menempatkan perempuan marjinal di belakang layar dalam urusan pengambilan keputusan politik.

Namun, meskipun akses mereka terbatas, beberapa perempuan marjinal tetap aktif dalam perilaku politik mereka. Banyak di antara mereka yang memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, misalnya dengan ikut serta dalam Pilkada, atau menjadi anggota kelompok tani yang mendukung calon tertentu. Keterlibatan perempuan marjinal dalam kegiatan politik lokal menunjukkan bahwa mereka tidak apatis terhadap masa depan daerahnya, namun sering kali dibatasi oleh hambatan struktural.

Secara umum, perilaku politik perempuan marjinal dapat dilihat melalui beberapa aspek. Pertama, tingkat partisipasi politik formal mereka. Dalam banyak kasus, perempuan marjinal tetap setia menggunakan hak pilih mereka, meskipun mereka tidak memiliki akses langsung pada informasi kampanye atau peluang untuk berpartisipasi dalam diskusi politik. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk perilaku politik pasif di mana mereka hanya terlibat dalam momen pemilu tanpa terlibat lebih lanjut dalam kegiatan politik lainnya.

Kedua, pada aspek informal, perilaku politik perempuan marjinal tercermin dalam cara mereka mendiskusikan dan menyuarakan pendapat di lingkungan keluarga atau komunitas. Pada umumnya, mereka akan berdiskusi dengan anggota keluarga atau rekan kerja sebelum mengambil keputusan politik. Pendekatan kolektif ini menunjukkan bahwa meskipun secara individu mungkin memiliki keterbatasan dalam memahami kompleksitas politik, mereka tetap memiliki pandangan dan preferensi politik yang jelas.

Ketiga, perilaku politik perempuan marjinal juga terlihat dalam partisipasi mereka dalam kelompok-kelompok sosial atau organisasi perempuan marjinal. Banyak perempuan marjinal yang tergabung dalam kelompok pengajian, arisan, atau koperasi yang sering kali menjadi wadah untuk berdiskusi politik secara informal. Kelompok-kelompok ini sering kali menjadi ruang aman bagi perempuan marjinal untuk berbagi aspirasi, mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi, dan merumuskan pandangan politik mereka. Di sini, perempuan marjinal dapat mengakses sumber daya politik melalui informasi yang disebarluaskan secara kolektif dan memberikan kesempatan untuk memperluas wawasan mereka dalam hal peran politik.

Namun, untuk mengoptimalkan perilaku politik perempuan marginal, penting adanya intervensi dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Pendidikan politik yang inklusif dan program pemberdayaan khusus bagi perempuan marginal dapat memperkuat akses mereka terhadap sumber daya politik. Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi perempuan marginal dalam politik, diharapkan peran mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas atau bahkan di ranah yang lebih luas dapat meningkat.

Secara keseluruhan, akses perempuan marginal terhadap sumber daya politik secara langsung berpengaruh terhadap perilaku politik mereka. Semakin banyak perempuan marginal yang memiliki akses ke pendidikan politik, informasi, dan peluang partisipasi, semakin tinggi pula kemungkinan mereka untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat mereka. Sumber daya politik yang inklusif dan mudah diakses menjadi kunci untuk mendorong partisipasi aktif perempuan marginal dalam politik, sehingga mereka dapat memainkan peran yang lebih besar dalam pembangunan komunitas mereka.

2. Faktor Sosial

Pengaruh faktor sosial terhadap perilaku politik perempuan marginal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung merupakan topik yang relevan dalam memahami dinamika politik masyarakat urban yang beragam. Perempuan marginal di perkotaan sering kali hidup dalam kondisi sosial-ekonomi yang tertekan dan akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan layanan sosial terbatas. Kondisi-kondisi ini memengaruhi bagaimana mereka membentuk persepsi dan membuat keputusan politik.

Faktor sosial utama yang mempengaruhi perilaku politik perempuan marginal adalah tingkat pendidikan, pekerjaan dan status ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, serta akses terhadap informasi.

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan memiliki peran krusial dalam menentukan sejauh mana perempuan marginal dapat terlibat secara aktif dalam proses politik. Tingkat pendidikan yang rendah dapat membatasi pemahaman mereka terhadap mekanisme politik dan konsekuensi dari pilihan politik mereka. Perempuan marginal yang tidak memiliki akses ke pendidikan tinggi cenderung kurang memahami hak-hak politik mereka, struktur pemerintahan, serta visi dan misi kandidat. Akibatnya, mereka mungkin lebih mudah dipengaruhi oleh kampanye kandidat yang menawarkan insentif jangka pendek daripada memperhatikan program-program yang berdampak panjang bagi kehidupan mereka.

b. Pekerjaan dan Status Ekonomi

Mayoritas perempuan marginal bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang rendah dan tidak tetap. Ketidakpastian ekonomi ini memengaruhi keputusan politik mereka, karena mereka cenderung mendukung kandidat yang menawarkan bantuan langsung atau program-program ekonomi jangka pendek. Dalam konteks pilkada langsung, insentif seperti bantuan sembako, uang tunai, atau program kesejahteraan lain sering kali menjadi faktor penarik bagi perempuan marginal dalam kelompok ini. Kondisi ekonomi mereka membuat mereka cenderung lebih rentan terhadap politik uang, karena mereka menganggap pilihan ini sebagai solusi sementara bagi kesulitan yang mereka alami.

c. Pengaruh Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap keputusan politik perempuan marginal. Jaringan sosial seperti keluarga, teman, dan komunitas menjadi sumber informasi utama bagi mereka. Dukungan atau dorongan dari jaringan sosial ini dapat

membentuk preferensi politik, terutama jika komunitas tersebut terafiliasi dengan partai politik atau memiliki koneksi dengan kandidat tertentu. Dalam lingkungan komunitas yang homogen, perempuan marjinal sering kali mengikuti arus pilihan politik dari kelompok mereka demi menjaga keharmonisan sosial dan untuk merasa diterima di lingkungan mereka.

d. Akses terhadap Informasi

Akses informasi menjadi tantangan signifikan bagi perempuan marjinal perkotaan. Mereka cenderung lebih bergantung pada informasi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat atau media massa yang mudah dijangkau. Akses yang terbatas terhadap informasi politik yang independen dan akurat membuat mereka rentan terhadap hoaks dan manipulasi informasi oleh tim kampanye tertentu. Kandidat yang mampu menyampaikan pesan dengan cara sederhana dan langsung biasanya lebih mudah mendapat dukungan dari perempuan marjinal yang tidak memiliki akses luas terhadap informasi mendalam mengenai politik.

Selain faktor-faktor sosial tersebut, karakteristik pilkada langsung juga berperan dalam mendorong keterlibatan perempuan marjinal perkotaan. Pilkada langsung memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara langsung dalam pemilihan pemimpin lokal, sehingga pilihan mereka lebih berpengaruh dalam menentukan kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Meski mereka terpengaruh oleh kondisi ekonomi dan sosial, perempuan marjinal tetap memiliki kesadaran akan kebutuhan mendasar seperti kesehatan, pendidikan anak, dan akses terhadap pekerjaan. Maka, kandidat yang dapat menjanjikan perubahan konkret di bidang-bidang ini cenderung memiliki daya tarik lebih.

Secara keseluruhan, faktor sosial berperan penting dalam membentuk perilaku politik perempuan marjinal di perkotaan. Faktor pendidikan, status ekonomi, lingkungan sosial, dan akses informasi secara bersama-sama menentukan bagaimana perempuan marjinal merespon dinamika pilkada langsung. Meski mereka menghadapi berbagai kendala, perempuan marjinal tetap memiliki potensi sebagai agen perubahan, khususnya bila mereka memperoleh dukungan untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak politik mereka.

3. Faktor Ekonomi

Perempuan marjinal umumnya hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Keterlibatan mereka dalam Pilkada langsung sering kali dipengaruhi oleh insentif material yang diberikan oleh kandidat atau partai politik. Dalam konteks kemiskinan, politik uang menjadi praktik yang masih banyak terjadi, di mana perempuan marjinal cenderung lebih rentan terhadap pengaruh ini. Bagi banyak perempuan marjinal, Pilkada sering kali dilihat sebagai momen untuk mendapatkan keuntungan sesaat daripada sebagai proses demokrasi jangka panjang.

Pengaruh faktor ekonomi terhadap perilaku politik perempuan marjinal dalam pilkada langsung merupakan aspek yang kompleks dan saling terkait dengan berbagai dimensi kehidupan sosial ekonomi perempuan marjinal di perkotaan. Perempuan marjinal sering kali menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, seperti keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak, pendapatan yang rendah, hingga keterbatasan akses terhadap fasilitas sosial, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini memengaruhi cara pandang dan prioritas mereka dalam menentukan pilihan politik, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlangsung secara langsung.

Secara umum, perempuan marjinal di wilayah perkotaan cenderung memprioritaskan isu-isu ekonomi dalam keputusan politik mereka, karena stabilitas ekonomi sangat menentukan kualitas hidup mereka. Mereka berharap dapat memperoleh kepastian hidup

yang lebih baik melalui kebijakan yang dapat mengurangi beban ekonomi yang mereka hadapi. Oleh karena itu, kandidat yang menawarkan program-program ekonomi yang relevan, seperti bantuan keuangan, peningkatan akses kesehatan dan pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi, biasanya memiliki daya tarik tersendiri bagi kelompok ini. Program bantuan tunai, pembinaan usaha kecil dan menengah, serta jaminan sosial sering kali menjadi penentu pilihan politik perempuan marjinal dalam pilkada langsung.

Faktor ekonomi juga mendorong perempuan marjinal untuk terlibat secara lebih aktif dalam kegiatan politik selama masa pilkada, baik sebagai peserta kampanye maupun sebagai pemilih yang kritis. Partisipasi mereka tidak hanya dilandasi oleh preferensi terhadap kandidat, tetapi juga sering kali oleh pertimbangan insentif langsung yang mungkin mereka peroleh selama masa kampanye, seperti pembagian sembako atau bentuk bantuan langsung lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa perilaku politik perempuan marjinal di perkotaan tidak semata-mata didorong oleh kesadaran politik, melainkan juga oleh pragmatisme ekonomi yang mendasari kehidupan sehari-hari mereka.

Dalam konteks ini, faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi tingkat partisipasi perempuan marjinal dalam pilkada langsung. Perempuan marjinal yang berada dalam kondisi ekonomi yang lebih sulit sering kali memiliki keterbatasan waktu dan akses untuk berpartisipasi aktif dalam kampanye politik atau aktivitas pilkada lainnya. Mereka cenderung lebih sibuk dengan aktivitas ekonomi informal atau pekerjaan rumah tangga yang memakan waktu sehingga keterlibatan mereka dalam kampanye politik mungkin lebih pasif atau terbatas. Selain itu, banyak perempuan marjinal yang masih tergantung secara finansial pada suami atau kepala keluarga, sehingga pilihan politik mereka pun sering kali sejalan dengan preferensi keluarga atau komunitas tempat mereka tinggal.

Meski demikian, dalam beberapa kasus, perempuan marjinal yang berpartisipasi aktif dalam pilkada juga memanfaatkan momen politik ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka, baik melalui peluang kerja temporer dalam kegiatan kampanye maupun dengan memperoleh keuntungan langsung dari aktivitas pilkada itu sendiri. Mereka menjadi lebih selektif dalam menentukan pilihan politik karena ingin memastikan bahwa kandidat yang terpilih benar-benar mampu menghadirkan perubahan konkret dalam kehidupan ekonomi mereka.

Pentingnya faktor ekonomi dalam perilaku politik perempuan marjinal juga berkaitan erat dengan harapan mereka terhadap masa depan yang lebih baik. Mereka menginginkan pemimpin yang mampu menciptakan kebijakan inklusif yang dapat mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi dan memberikan akses yang lebih adil terhadap berbagai sumber daya. Dalam hal ini, perempuan marjinal bukanlah sekadar kelompok pasif yang mengikuti arus politik, melainkan agen-agen yang kritis dan pragmatis dalam menggunakan hak pilih mereka sebagai bentuk harapan terhadap perubahan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, faktor ekonomi merupakan elemen sentral yang membentuk perilaku politik perempuan marjinal dalam pilkada langsung. Pengaruhnya tidak hanya tampak pada pilihan politik mereka, tetapi juga pada cara mereka memanfaatkan momen politik untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek maupun peluang peningkatan kesejahteraan di masa depan.

4. Faktor Budaya Patriarki

Di banyak daerah pedesaan, budaya patriarki masih sangat kuat, di mana laki-laki dianggap lebih berhak dalam hal pengambilan keputusan, termasuk dalam politik.

Perempuan marjinal sering kali hanya mengikuti keputusan politik yang diambil oleh laki-laki dalam keluarga atau komunitas mereka. Budaya ini tidak hanya membatasi perempuan marjinal untuk mengekspresikan preferensi politik mereka secara bebas, tetapi juga mengurangi motivasi mereka untuk terlibat aktif dalam Pilkada langsung.

Budaya patriarki merupakan sistem nilai yang menempatkan laki-laki pada posisi superior dalam struktur sosial, budaya, dan politik, serta cenderung menempatkan perempuan marjinal pada posisi subordinat. Di wilayah perkotaan, budaya ini tetap mengakar meskipun ada kemajuan dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan kesetaraan gender. Dalam konteks perilaku politik perempuan marjinal pada pilkada langsung, budaya patriarki ini memberikan dampak yang signifikan dalam memengaruhi partisipasi dan pilihan politik perempuan marjinal. Faktor-faktor yang berhubungan dengan patriarki, seperti stereotip gender, ketergantungan ekonomi, dan ketidaksetaraan dalam akses informasi, turut menentukan bagaimana perempuan marjinal memandang dan berpartisipasi dalam politik.

Perempuan marjinal di perkotaan sering kali menghadapi tantangan ekonomi yang memaksa mereka untuk menggantungkan diri pada penghasilan laki-laki atau pemberi kerja, sehingga kemandirian mereka dalam memilih kandidat politik cenderung terbatas. Ketergantungan ekonomi ini menjadikan perempuan marjinal lebih mudah terpengaruh oleh pandangan atau pilihan politik pasangan atau pemimpin komunitas laki-laki yang lebih dominan. Dalam budaya patriarki, laki-laki cenderung memiliki wewenang lebih besar dalam menentukan pilihan keluarga dalam pilkada, mengakibatkan perempuan marjinal sering kali hanya mengikuti keputusan tersebut tanpa mempertimbangkan aspirasinya sendiri.

Di sisi lain, stereotip yang mengakar bahwa politik adalah ranah laki-laki membuat perempuan marjinal cenderung tidak aktif dalam proses politik atau ragu untuk mengekspresikan pendapat politiknya secara terbuka. Patriarki membentuk anggapan bahwa perempuan marjinal "kurang cocok" atau "tidak kompeten" dalam memahami isu-isu politik. Hal ini menghambat kepercayaan diri perempuan marjinal untuk terlibat dalam proses pilkada, terutama dalam mengemukakan aspirasi atau kritik terhadap calon kandidat yang dirasa kurang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pengaruh budaya ini menyebabkan keterbatasan perempuan marjinal dalam memahami hak pilihnya secara kritis, terutama terkait isu yang memengaruhi kesejahteraan mereka dan keluarganya.

Selain itu, dalam budaya patriarki, perempuan marjinal kerap kali diposisikan sebagai "penjaga moral" keluarga yang harus menempatkan kepentingan keluarga di atas ambisi politik pribadi. Dengan anggapan ini, perempuan marjinal yang cenderung aktif berpolitik sering kali dianggap tidak menghormati norma sosial. Bagi perempuan marjinal perkotaan, tekanan sosial ini lebih kuat karena keterbatasan ekonomi membuat mereka lebih rentan terhadap stigma atau penilaian dari komunitas sekitar. Sebagai akibatnya, perempuan marjinal cenderung menarik diri dari aktivitas politik atau lebih memilih calon yang dianggap "aman" dalam pandangan komunitas patriarki.

Namun, pada beberapa kasus, terdapat perempuan marjinal yang mampu melampaui batasan budaya patriarki dengan cara bergabung dalam kelompok perempuan marjinal atau organisasi sosial. Mereka yang bergabung dalam kelompok semacam ini biasanya memiliki kesadaran politik yang lebih tinggi dan berani mengekspresikan aspirasi politiknya dengan lebih mandiri. Organisasi sosial memberikan ruang bagi perempuan marjinal untuk saling bertukar informasi politik, meningkatkan pemahaman isu, dan mendorong mereka untuk

menentukan pilihan berdasarkan kebutuhan mereka sendiri, bukan karena tekanan keluarga atau komunitas.

Kesimpulannya, faktor budaya patriarki memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk perilaku politik perempuan marjinal dalam pilkada langsung. Budaya ini tidak hanya membatasi pilihan politik perempuan marjinal, tetapi juga memengaruhi kepercayaan diri mereka untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Dengan memperkuat kesadaran politik dan kemandirian perempuan marjinal melalui kelompok sosial atau organisasi, perempuan marjinal diharapkan dapat semakin kritis dan berdaya dalam menentukan pilihannya secara bebas dan sesuai dengan aspirasinya sendiri. Upaya pendidikan politik dan pemberdayaan perempuan marjinal perlu terus dikembangkan untuk mengurangi pengaruh patriarki dan meningkatkan partisipasi politik perempuan marjinal dalam pilkada langsung.

5. Implikasi Perilaku Politik Perempuan Marjinal

Pemahaman terhadap perilaku politik perempuan marjinal dalam Pilkada langsung memiliki implikasi yang luas, baik bagi pengembangan demokrasi di tingkat lokal maupun bagi pemberdayaan perempuan marjinal itu sendiri. Jika perempuan marjinal dapat lebih aktif terlibat dalam proses politik, suara mereka akan lebih diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan di tingkat lokal, terutama kebijakan yang berkaitan dengan pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan keluarga petani.

Partisipasi politik perempuan marjinal juga dapat memperkuat representasi perempuan marjinal dalam pemerintahan daerah. Dengan adanya pemimpin yang memahami kebutuhan dan aspirasi perempuan marjinal, kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu pertanian, pemberdayaan perempuan marjinal, dan pengentasan kemiskinan dapat diimplementasikan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pendidikan politik yang lebih intensif, peningkatan akses informasi, serta pemberdayaan perempuan marjinal melalui berbagai program pengembangan kapasitas.

Kesimpulan

Perilaku politik perempuan marjinal dalam Pilkada langsung mencerminkan tantangan dan peluang bagi demokrasi di tingkat lokal. Meskipun perempuan marjinal memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, berbagai kendala struktural dan kultural masih menghambat keterlibatan aktif mereka. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan marjinal dalam politik harus difokuskan pada pendidikan politik, penguatan kapasitas perempuan marjinal, dan perubahan budaya yang lebih inklusif. Dengan demikian, perempuan marjinal dapat berkontribusi secara lebih signifikan dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah.

Referensi

- Anugrah, I. S. (2022). Komunikasi Politik dan Proses Pengambilan Keputusan: Pembelajaran Model Prima Tani menjadi Program Simantri di Bali. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 20(1).
- Arfi, A. P. S., Yulhendri, & Magriasti, L. (2023). Perspektif Ekonomi Islam dalam Masalah Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 2(3). <https://doi.org/10.53867/jea.v2i3.75>
- Asmorojati, A. W., & Nur, M. (2019). Peran perempuan marjinal dalam pemilihan umum di era demokrasi. *Prosiding Seminar Nasional Hasil ...*, September, 341–350. <http://seminar.uad.ac.id/index.php/senimas/article/view/3007>

- Bela, H. S., & Utama, A. S. (2020). Motivasi Partisipasi Politik Perempuan marginal Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(2), 41–49. <https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1029>
- Creswell, John W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Denzin, NK, & Lincoln, YS (Eds.). (2018). Buku Pegangan Penelitian Kualitatif SAGE (Edisi ke-5). Los Angeles, CA: Bijaksana.
- Husmidar, W. O. S., Safar, M. S., & P, A. S. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi di Desa Langku-Langku Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat). *SELAMI IPS*, 13(1). <https://doi.org/10.36709/selami.v13i1.13614>
- Kollo, F. L. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan marginal dalam Bidang Politik. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, November*, 320–318.
- Kushandajani, K., Fitriyah, F., Alfirdaus, L. K., & Martini, R. (2023). Kemandirian Perempuan marginal Pedesaan dalam Menentukan Pilihan Politik di Ranah Pemilihan Kepala Desa: Studi Perilaku Memilih dari Dimensi Sosiologi dan Psikologi. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2). <https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.269-286>
- Ladini, M., & Yuwanto, Y. (2019). Perilaku Memilih Pemegang Kartu Tani pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 Kabupaten Semarang. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2). <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.2887>
- Mahmud, R., & Yunus, R. (2019). Orientasi Budaya Politik Perempuan marginal (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNG Pada Pemilihan Umum 2019). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*.
- Manar, D. G. (2018). Pilkada Langsung Dan Rekonstruksi Demokrasi Indonesia. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(2). <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i2.2118>
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. (2018). Qualitative Data Analysis. (Fourth Edi). SAGE Publication. Ltd.
- Pambudi, M. Y. (2012). Perempuan marginal dan Politik: Studi tentang Aksesibilitas Perempuan marginal Menjadi Anggota Legislatif Di Kabupaten Sampang. *Jurnal Politik Muda*, 1(1).
- Putri, A. S., & Putri, N. E. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pada Pilkada Serentak Kab 50 Kota Di Kecamatan Guguk. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.2955>
- Rosyada, D. (2020). Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan. Jakarta: Kencana
- Sarinastiti, N., & Fatimah, P. S. (2019). Edukasi komunikasi politik dalam menciptakan kesadaran dan minat pemilih perempuan marginal. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(1). <https://doi.org/10.24198/jkk.v7i1.19125>
- Siregar, D. M. S., Manik, A., Manurung, R. G., Harahap, A., & Ivanna, J. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1). <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1563>
- Suhenty, L. (2022). Relevansi Partisipasi Politik Perempuan marginal Dan Keterpilihan Perempuan marginal Dalam Pilkada Serentak 2020. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2). <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.174>

- Tarigan, S. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Meda Tahun 2020. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Tokan, F. B., & Gai, A. (2020). Partisipasi Politik Perempuan marjinal (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan marjinal dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone - Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Caraka Prabhu*, 4(2), 213–234. <https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.298>